

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Nor Elsa Rahman (2021), dalam penelitian yang berjudul "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Sungai Pinang dan Desa Pandulangan)". Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai. Penelitian ini merupakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas PKH di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara belum efektif. *Pertama*, pada aspek keberhasilan program dengan indikator kemampuan operasional dalam melaksanakan program kerja pada Desa Sungai Pinang belum efektif sosialisasi yang dilakukan tokoh masyarakat dan masyarakat luas serta aparat desa maupun RT tidak dilakukan dengan baik. Sedangkan pada Desa Pandulangan belum efektif sosialisasi yang dilakukan hanya 1 kali baik dengan penerima manfaat PKH, masyarakat luas maupun aparat desa serta RT. *Kedua*, pada aspek keberhasilan sasaran dengan indikator kesesuaian rencana dengan tujuan yang dicapai baik pada Desa Sungai Pinang dan Desa Pandulangan belum efektif karena bantuan PKH banyak didapati oleh masyarakat yang memang sudah mampu sedangkan masyarakat yang tidak mampu banyak yang belum mendapatkan bantuan. *Ketiga*, Pada aspek kepuasan terhadap program dengan indikator kepuasan mendapatkan program baik pada Desa Sungai Pinang

maupun pada Desa Pandulangan sudah efektif karena penerima bantuan PKH merasa senang dan puas. *Keempat*, tingkat input dan output dengan indikator *Standar Operasional Procedure (SOP)* baik pada Desa Sungai Pinang maupun pada Desa Pandulangan sudah efektif karena sesuai alur pelaksanaan PKH. *Kelima*, pencapaian tujuan menyeluruh dengan indikator ketercapaian tujuan program belum efektif, karena pada Desa Sungai Pinang program PKH tingkat kesehatan pada balita belum dapat meningkatkan taraf hidup kesehatan dikarenakan adanya stunting dan untuk pada Desa Pandulangan komponen pendidikan masih ada yang tidak memenuhi komitmen. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu: kurangnya koordinasi dengan aparat pemerintah, terdapat tekanan dari pihak lain dalam masyarakat, partisipasi tingkat pendidikan rendah, kurangnya pendamping PKH, sumber daya yang belum diperbarui, dan minimnya pola pikir KPM.

2. Mardiana (2021), dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Takulat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong”. Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan PKH di Desa Takulat Kabupaten Tabalong belum efektif. *Pertama*, pada sub variabel keberhasilan program pada indikator proses mekanisme penyaluran bantuan berjalan dengan baik terdapat kerjasama antar berbagai pihak dalam penyaluran bantuan PKH pada komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. *Kedua*, pada sub

variabel keberhasilan sasaran pada indikator pencapaian tujuan belum tercapai pada komponen pendidikan hal ini dapat terlihat dari kehadiran sekolah anak penerima program masih rendah, pada komponen kesehatan dan kesejahteraan sosial sudah efektif. *Ketiga*, pada sub variabel kepuasan terhadap program pada indikator kepuasan pengguna ada kebutuhan dana belum puas pada komponen pendidikan bantuan yang diberikan masih kurang, pada komponen kesehatan dan kesejahteraan sosial sudah efektif. *Keempat*, pada sub variabel tingkat input dan output, pada indikator kesesuaian dana pada komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial sudah efektif, pada indikator penggunaan dana yang didapat pada komponen pendidikan belum sesuai peraturan, pada komponen kesehatan dan kesejahteraan sosial sudah sesuai peraturan. *Kelima*, pada sub variabel pencapaian tujuan menyeluruh pada indikator meningkatkan kesejahteraan pada komponen pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial sudah efektif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan PKH di Desa Takulat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong adalah: *Pertama*, faktor penghambat seperti penyalahgunaan dana bantuan. *Kedua*, faktor pendukung adanya sosialisasi tentang PKH dan adanya konsisten para pelaksana dalam bertindak tegas dalam pelaksanaan PKH.

B. Tinjauan Teoritis

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata bahasa inggris yakni Effective yang berarti tercapainya suatu pekerjaan dan perbuatan yang direncanakan.

Efektivitas adalah suatu keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditemukan, efektivitas disebut efektif apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Pada kamus besar Bahasa Indonesia, efektivitas diartikan sebagai sesuatu yang ada efeknya (akibat, pengaruhnya) dapat diartikan dapat membawa hasil, berhasil guna serta dapat pula berarti mulai berlaku. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi. Organisasi biasanya berada dalam lingkungan yang bergejolak dengan sumber data yang terbatas. Lingkungan yang berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman, perubahan tersebut akan mempengaruhi efektivitas organisasi.

Berdasarkan Ensiklopedi Umum Administrasi (Mutiarin dan Zainuddin, 2021:95) menyatakan bahwa efektivitas berasal dari kata kerja efektif, berarti terjadinya suatu akibat atau efek yang dikehendaki dalam perbuatan. Setiap pekerjaan yang efektif belum tentu efisien, karena mungkin hasil dicapai dengan penghamburan material, juga berupa pikiran, tenaga, waktu maupun benda lainnya. Kata efektivitas sering diikuti dengan kata efisiensi, dimana kedua kata tersebut sangat berhubungan dengan produktivitas dari suatu tindakan atau hasil yang diinginkan. Suatu yang efektif belum tentu efisien, demikian juga sebaliknya suatu yang efisien belum tentu efektif. Dengan demikian istilah efektif adalah melakukan pekerjaan yang benar dan sesuai serta dengan cara yang tepat untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan. Sedangkan efisien adalah hasil dari usaha yang telah dicapai lebih besar dari usaha yang dilakukan.

Menurut Caster I, Bernard (Mutiarin dan Zainudin, 2021:96) efektivitas adalah ‘tercapainya sasaran yang telah disepakati bersama’.

Menurut Drucker dan Nuruddin (Mutiarin dan Zainudin, 2021:96), menyatakan bahwa efektivitas berarti ‘melakukan sesuatu yang benar atau sejauhmana kita mencapai tujuan’.

Menurut Handoko (Mutiarin dan Zainudin, 2021:96), menyatakan bahwa efektivitas adalah ‘kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan’.

Menurut Komaruddin (Mutiarin dan Zainudin, 2021:96), mengemukakan bahwa efektivitas adalah ‘suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu’.

The Liang Gie (Mutiarin dan Zainudin, 2021:97-98) berpendapat efektivitas merupakan ‘keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, maka perbuatan itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mencapai maksud sebagaimana dikehendaki’.

Menurut Hidayat (Mutiarin dan Zainudin, 2021:98), efektivitas adalah ‘suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai’. Dimana makin besar persentasi target yang di capai, makin tinggi efektivitasnya.

Berdasarkan beberapa pengertian efektivitas diatas, dapat dipahami bahwa efektivitas merupakan sebuah patokan untuk membandingkan antara proses yang dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang di capai. Suatu program dikatakan efektif apabila usaha dan tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Efektivitas digunakan sebagai tolak ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai.

2. Model-Model Pengukuran Efektivitas

Menurut Campbell J.P (Mutiarin dan Zainudin, 2021:96-97),

pengukuran efektivitas secara umum yang paling menonjol adalah:

- a. Keberhasilan Program
Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan program dapat ditinjau dari proses dan mekanisme suatu kegiatan yang dilakukan di lapangan.
- b. Keberhasilan Sasaran
Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan dengan memusatkan perhatian terhadap aspek *output*, artinya efektivitas dapat diukur dengan seberapa jauh tingkat *output* dalam kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Kepuasan Terhadap Program
Kepuasan merupakan kriteria efektivitas yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Kepuasan dirasakan oleh para pengguna terhadap kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Semakin berkualitas produk dan jasa yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan oleh pengguna semakin tinggi, maka dapat menimbulkan keuntungan bagi lembaga.
- d. Tingkat Input dan Output
Pada efektivitas tingkat input dan output dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*). Jika output lebih besar dari input maka dapat dikatakan efisien dan sebaliknya jika input lebih besar dari output maka dapat dikatakan tidak efisien.
- e. Pencapaian Tujuan Menyeluruh
Sejauh mana organisasi melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini merupakan penilaian umum dengan sebanyak mungkin kriteria tunggal dan menghasilkan penilaian umum efektivitas.

Gibson et.al (Mutiarin dan Zainudin, 2021:98) menyimpulkan kriteria efektivitas suatu kegiatan dalam tiga indikator yang berdasarkan ada jangka waktu yaitu:

- a. Efektivitas jangka pendek meliputi produksi (*production*), efisien (*efficiency*), dan kepuasan (*satisfaction*);

- b. Efektivitas jangka menengah meliputi kemampuan menyesuaikan diri (*adaptiveness*) dan mengembangkan diri (*development*);
- c. Efektivitas jangka Panjang: keberlangsungan (*sustainability*).

3. Pendekatan Terhadap Efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana efektivitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas Parta Setiawan (<https://www.gurupendidikan.co.id/faktor-efektivitas-organisasi/> (online) di akses September 2025), yaitu:

a. Pendekatan Pencapaian Tujuan (*goal attainment approach*)

Pendekatan pencapaian tujuan mengasumsi bahwa organisasi adalah kesatuan yang dibuat dengan sengaja, rasional, dan mencari tujuan. Oleh karena itu, pencapaian tujuan yang berhasil menjadi sebuah ukuran yang tepat tentang keefektifan. Namun demikian agar pencapaian tujuan bisa menjadi ukuran yang sah dalam mengukur keefektifan organisasi, asumsi-asumsi lain juga harus diperhatikan. Pertama, organisasi harus mempunyai tujuan akhir. Kedua, tujuan-tujuan tersebut harus diidentifikasi dan ditetapkan dengan baik agar dapat dimengerti. Ketiga, tujuan-tujuan tersebut harus sedikit saja agar mudah dikelola. Keempat, harus ada consensus atau kesepakatan umum mengenai tujuan-tujuan tersebut.

b. Pendekatan Sistem (*system approach*)

Pendekatan sistem terhadap efektifitas organisasi mengimplikasikan bahwa organisasi terdiri dari sub-sub bagian yang saling berhubungan. Jika salah satu sub bagian ini mempunyai performa yang buruk, maka akan timbul dampak yang negative terhadap performa keseluruhan sistem. Keefektifan membutuhkan kesadaran dan interaksi yang berhasil dengan konstituensi lingkungan. Manajemen tidak boleh gagal dalam mempertahankan hubungan yang baik dengan para pelanggan, pemasok, lembaga pemerintahan, serikat buruh, dan konstituensi sejenis yang mempunyai kekuatan untuk mengacaukan operasi organisasi yang stabil. Kekurangan yang paling menonjol dari pendekatan sistem adalah hubungannya dengan pengukuran dan masalah apakah cara-cara itu memang benar-benar penting. Keunggulan akhir dari pendekatan sistem adalah kemampuannya untuk diaplikasikan jika tujuan akhir sangat samar atau tidak dapat diukur.

c. Pendekatan Konstituen-Strategis (*strategic-constituencies approach*)

Pendekatan konstituensi-strategis memandang orang organisasi secara berbeda. Organisasi diasumsikan sebagai arena politik tempat kelompok-kelompok yang berkepentingan bersaing untuk mengendalikan sumber daya. Dalam konteks ini, keefektifan

organisasi menjadi sebuah penilaian tentang sejauh mana keberhasilan sebuah organisasi dalam memenuhi tuntutan konstituensi kritisnya yaitu pihak-pihak yang menjadi tempat bergantung organisasi tersebut untuk kelangsungan hidupnya di masa depan.

d. Pendekatan Nilai-nilai Bersaing (*competing-values approach*)

Nilai-nilai bersaing secara nyata melangkah lebih jauh dari pada hanya pengakuan tentang adanya pilihan yang beraneka ragam. Pendekatan tersebut mengasumsikan tentang adanya pilihan yang beraneka ragam. Pendekatan tersebut mengasumsikan bahwa berbagai macam pilihan tersebut dapat dikonsolidasikan dan diorganisasi. Pendekatan nilai-nilai bersaing mengatakan bahwa elemen tersebut dapat dikombinasikan sedemikian rupa sehingga menciptakan kumpulan dasar mengenai nilai-nilai bersaing. Masing-masing kumpulan tersebut lalu membentuk sebuah model keefektifan yang unik.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas organisasi, menurut A Syadzy (<http://eprints.walisongo.ac.id.pdf> (online di akses September 2025)), diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Karakteristik Organisasi

Hubungan yang sifatnya relative tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. Struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. Dalam struktur, manusia ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.

b. Karakteristik Lingkungan

Mencakup dua aspek. Pertama adalah lingkungan ekstern, yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim organisasi, yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi.

c. Karakteristik Pekerja

Merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi, jadi apabila suatu organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi.

d. **Karakteristik Manajemen**

Merupakan strategi dan mekanisme kerja yang di rancang untuk mengondisikan semua hal yang di dalam organisasi sehingga efektivitas tercapa. Kebijakan dan praktik manajemen merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi, dalam melaksanakan kebijakan dan praktik manajemen.

5. Konsep Program Keluarga Harapan

Konsep kesejahteraan sosial merupakan tujuan akhir dari tercapainya Program Keluarga Harapan. Dengan dilaksanakannya Program Keluarga Harapan ini diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan sosial ekonomi, pendidikan, serta kesehatan masyarakat khususnya Desa Kayu Abang Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, karena Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan.

Sedangkan menurut undang-undang Nomor 11 tahun 2019 tentang kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

a. **Definisi Program Keluarga Harapan**

Salah satu kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan kemiskinan yang ada di Indonesia adalah dengan membentuk Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan pemberian bantuan sosial besyarat kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Adapun yang dimaksud dari Program Keluarga Harapan adalah program yang

memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan syarat KPM yang menerima bantuan tersebut diharuskan untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dimana persyaratan tersebut berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu: *pertama* untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. *Kedua* mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. *Ketiga* menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial. *Keempat* mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. *Kelima* mengenalkan manfaat dan produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga manfaat.

1) Pelaksana Program Keluarga Harapan

PKH (Pedoman PKH Tahun 2019 :25) sebagai program prioritas nasional dilaksanakan oleh kementerian sosial RI dan bekerjasama dengan mitra kerja, antara lain:

- a) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI berperan mengkoordinasi penyelenggaraan seluruh program penanggulangan kemiskinan.
- b) Kementerian PPN/Bappenas, berperan dalam perencanaan serta monitoring dan evaluasi program.

- c) Kementrian Keuangan RI, sebagai bendahara urusan negara memberikan dukungan anggaran dan regulasi penyaluran bantuan sosial.
- d) Kementrian Kesehatan RI, berperan sebagai penyedia layanan kesehatan dan membantu pelaksanaan verifikasi kesehatan.
- e) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Kementrian Agama RI, berperan sebagai penyedia layanan kependidikan dan membantu pelaksanaan verifikasi Pendidikan.
- f) Kementrian Komunikasi dan Informasi RI, berperan dalam pelaksanaan sosialisasi PKH secara nasional.
- g) Kementrian Dalam Negeri RI, berperan dalam memfalisasi penertiban data kependudukan KPM PKH.
- h) Badan Pusat Statistik (BPS), berperan dalam pelaksanaan pendataan kemiskinan untuk Basic Data Terpadu.
- i) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berperan dalam dukungan PKH secara langsung melalui alokasi dana dampingan (sharing) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

2) Tujuan Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (Pedoman Pelaksanaan PKH

Tahun 2019:25-26) bertujuan untuk:

- a) Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- b) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- d) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- e) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

3) Sasaran Program Keluarga Harapan

Sasaran PKH (Pedoman Pelaksana PKH Tahun 2020:4) merupakan “Keluarga yang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang dikelola oleh pusat data dan informasi (pusdatin), kementerian sosial RI. Keluarga tersebut harus memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial untuk ditetapkan sebagai KPM PKH”.

4) Kriteria Penerima Manfaat PKH

Penerima PKH dapat dibedakan berdasarkan komponen, yaitu komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Setiap komponen memiliki kriteria dengan rincian berikut:

a) Komponen Kesehatan

Kriteria penerima PKH (Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2021:22-23) komponen kesehatan adalah sebagai berikut:

(1) Ibu hamil/nifas/menyusui

Ibu hamil/nifas/menyusui adalah kondisi seseorang yang sedang mengandung kehidupan baru dengan jumlah kehamilan yang dibatasi dan atau berada dalam masa menyusui.

(2) Anak usia dini

Anak usia dini adalah anak dengan rentang usia 0-6 tahun (umur anak dihitung dari hari ulang tahun terakhir) yang belum bersekolah.

b) Komponen Pendidikan

Kriteria penerima PKH (Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2021:23) komponen Pendidikan yakni anak usia sekolah. Anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar, yang menempuh tingkat Pendidikan SD/MI sederajat atau SMP/MTs sederajat, dan/atau SMA/MA sederajat.

c) Komponen Kesejahteraan Sosial

Kriteria penerima PKH (Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2021:23) komponen kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

(1) Lanjut usia

Seseorang berusia lanjut yang tercatat dalam kartu keluarga yang sama dan berada dalam keluarga.

(2) Penyandang disabilitas berat

Penyandang disabilitas berat adalah penyandang disabilitas yang kestabilitasnya sudah tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya tergantung orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri tercatat dalam kartu keluarga yang sama dan berada dalam keluarga.

d) Hak KPM Program Keluarga Harapan

Keluarga Penerima Manfaat PKH (Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2021:24) berhak mendapatkan:

- (1) Bantuan sosial PKH;
- (2) Pendampingan sosial PKH;
- (3) Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan
- (4) Program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

e) Kewajiban KPM Program Penerima Harapan

Kewajiban peserta PKH (Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2021:24) terdiri atas enam hal sebagai berikut:

- (1) Komponen Kesehatan terdiri dari ibu hamil/nifas/menyusui, anak usia dini (0-6 tahun) yang

belum bersekolah wajib memeriksakan kesehatan pada fasilitas/layanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan;

- (2) Komponen Pendidikan terdiri anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun, wajib mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif;
- (3) Komponen Kesejahteraan Sosial terdiri dari lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas berat, wajib mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan yang dilakukan minimal setahun sekali;
- (4) KPM hadir dalam pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan;
- (5) Seluruh anggota KPM harus memenuhi kewajibannya, kecuali jika terjadi keadaan kahar (force majeure);
- (6) KPM yang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi. Mekanisme sanksi ditetapkan lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan verifikasi komitmen.

f) Besaran Bantuan PKH

Besaran dana bantuan PKH 2025 berdasarkan kategori penerima yang dicairkan sebanyak 4 kali dalam setahun diklasifikasikan seperti berikut ini:

- (1) Ibu hamil/nifas/menyusui akan mendapat bantuan sebesar Rp3.000.000 per tahun (Rp750.000 per tahap)
- (2) Anak usia dini 0-6 tahun akan mendapat bantuan sebesar Rp3.000.000 per tahun (Rp750.000 per tahap)
- (3) Para penyandang disabilitas berat mendapatkan Rp2.400.000 per tahun (Rp600.000 per tahap)
- (4) Dan lanjut usia 60 tahun ke atas akan mendapatkan Rp2.400.000 per tahun (Rp600.000 per tahap)
- (5) Selain itu, pendidikan anak SD/Sederajat akan mendapatkan bantuan sebesar Rp900.000 per tahun (Rp225.000 per tahap)
- (6) Pendidikan anak SMP/Sederajat akan mendapatkan Rp1.500.000 per tahun (Rp375.000 per tahap)
- (7) Dan pendidikan anak SMA/Sederajat akan mendapatkan Rp2.000.000 per tahun (Rp500.000 per tahap)

Bantuan dana yang akan diberikan tersebut, maksimal untuk 4 orang dalam satu keluarga penerima bantuan. Peserta PKH 2025 harus masuk ke dalam kategori keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

g) Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Mekanisme pelaksanaan PKH (Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2021:26-35) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- (1) Perencanaan
- (2) Pertemuan awal dan validasi
- (3) Penetapan KPM PKH
- (4) Penyaluran bantuan sosial
- (5) Pemutakhiran data
- (6) Verifikasi komitmen
- (7) Pendampingan
- (8) Transformasi kepesertaan.

Mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH secara non tunai meliputi:

- (1) Pembukaan rekening Bantuan Sosial PKH
- (2) Sosialisasi dan edukasi
- (3) Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera
- (4) Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH
- (5) Penarikan dan Bantuan Sosial PKH
- (6) Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH
- (7) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran Bantuan Sosial PKH

C. Kerangka Pemikiran

Pada Pedoman Umum PKH (2021:26), Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir ditengah-tengah masyarakat, khususnya di Negara-Negara Berkembang. Penanggulangan kemiskinan di Indonesia perlu didukung dengan program yang dapat mengurangi kemiskinan dan menurunkan kesenjangan antar kelompok miskin sehingga efektivitas suatu

organisasi dapat tercapai. Salah satu program kemiskinan tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH).

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan maka akan dibahas tentang Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Kayu Abang Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang peneliti kemukakan, maka pengkaji mengenai Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Kayu Abang Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan dilakukan penelitian dengan berdasarkan pada Teori Efektivitas menurut Champbell J.P. (Mutiarin dan Zainudin, 2021:96-97), yaitu Keberhasilan Program, Keberhasilan Sasaran, Kepuasan Terhadap Program, Tingkat Input dan Output, Pencapaian Tujuan yang Menyeluruh.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan memberikan gambar terhadap kerangka pemikiran dalam penelitian ini yang dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

